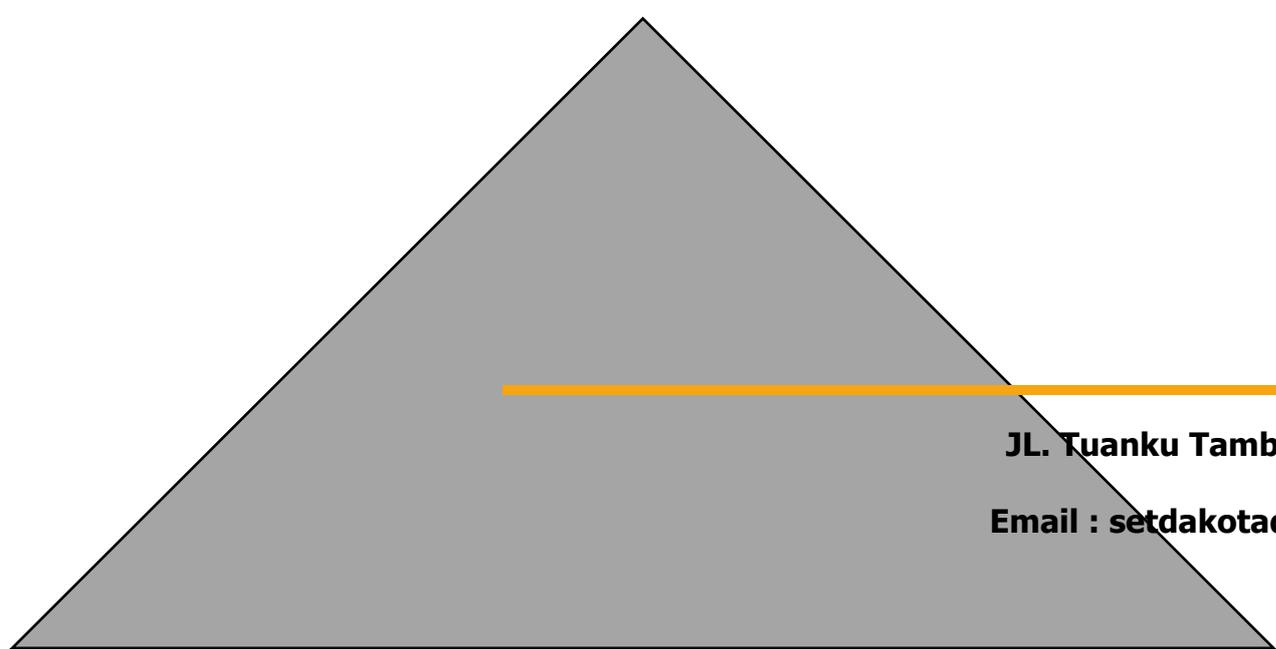




**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**



**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKJIP)
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA DUMAI
TAHUN 2023**



**JL. Tuanku Tambusai, Bagan Besar
Dumai – 28882
Email : setdakotadumai@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKjIP ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Sekretariat Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN, S. IP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651007 198603 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Isu-isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	7
1.6 Peta Proses Bisnis.....	10
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.2 Tujuan dan Sasaran	16
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program.....	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	28
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023.....	36
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	40
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional Target Nasional	43
3.5 Akuntabilitas Keuangan	44
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	47
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
BAB IV PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	17
Tabel 2.3.1	Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2023	20
Tabel 2.3.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Dumai	23
Tabel 2.4.1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai	24
Tabel 2.4.2	Program Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023	25
Tabel 2.4.3	Program Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja.....	28
Tabel 3.1.1	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	29
Tabel 3.2.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	36
Tabel 3.3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra	41
Tabel 3.4.1	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	43
Tabel 3.5.1	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	45
Tabel 3.6.1	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai	4
Gambar 1.5.1	Cascading Kinerja Sekretariat Daerah	7
Gambar 1.6.1	Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kota Dumai	10

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Daerah.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis Sekretariat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh seorang Sekretaris. yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Dumai dan menjalankan fungsi Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Sekretariat Daerah Kota Dumai melaksanakan keempat MISI yang ada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri;
Sasaran : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Saing Daerah
2. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu;
Sasaran : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kota Dumai

3. Misi 3 : Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas;
Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Kota
4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Tujuan Strategis Organisasi :

1. Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah
2. Menjadikan BUMD yang mandiri dan Profesional
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ
4. Meningkatkan kerjasama daerah dengan Institusi Pendidikan
5. Mewujudkan tertib administrasi kewilayahan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi perangkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Dumai 2021–2026 telah menetapkan 6 (enam) Tujuan dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Dumaidalam menyukkseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 3(tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SKPD
- Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

10. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

11. Kegiatan Penataan Organisasi

- Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
- Sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

- Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
- Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait

Kesejahteraan Sosial

- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
- Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi SDA

- Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup
- Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Energi

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : (apabila mengalami perubahan)

Tabel I
Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah 2.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 3. Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	2 6 1
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa beprestasi	30
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	6
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota	Persentase Capaian Penegasan Batas antar	29.2

	Dumai	Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	30

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 98.575.166.924 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) untuk melaksanakan 3 (Tiga) Program Kerja antara lain :

Tabel II
Program Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

N O.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 62.216.151.818,-	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.323.132.240,-	Dana Bagi Hasil
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 6.035.882.866,-	Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp 98.575.166.924,-	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III
Perubahan Perjanjian Kinerja

Sekretariat Daerah Tahun 2023

N O.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 62.216.151.818,-	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.323.132.240,-	Dana Bagi Hasil
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 6.035.882.866,-	Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 98.575.166.924,-	

Sekretariat Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV
Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	2	11	550%	√			
		Terlaksananya Kerjasama Daerah	6	20	333%	√			
			1	0	0%				

		dengan Pihak Ketiga Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri							√
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	100%	√			
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	30	30	133%	√			
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	6	3	83%		√		
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	29,2	29,2	100%	√			
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	30	29	97%	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai selama Tahun 2023 termasuk kategori 2 (Dua) yaitu Berhasil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.98.575.166.924,- (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) bersumber dari Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH).Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 89.543.642.468,- (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 9.031.524.456,- (*Sembilan Milyar Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

1	Belanja Operasi	:	Rp.	89.543.642.468,-
.				
2	Belanja Modal	:	Rp.	9.031.524.456,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	98.575.166.924,-

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel V
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8

<p>Tujuan : Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah</p> <p>Sasaran : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri</p>	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga	10	32	320%	303.407.700,-	290.670.898,-	95,80%
	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	2	11	550%			
	Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	6	20	333%			
	Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	1	0	0%			
<p>Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p>	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%
<p>Tujuan : Menjadikan BUMD yang Mandiri dan Profesional</p> <p>Sasaran : Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD</p>	Jumlah BUMD yang dibina dan dikembangkan	3	3	3	256.855.000,-	249.576.279,-	97,17%
	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	100%			

Program : Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan Pembangunan				6.035.882.866,-	5.799.539.937,-	96,08%
Tujuan : Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ Sasaran : Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh bantuan beasiswa Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	30 30	40 40	30 133%	11.250.000.000,-	10.927.310.804,-	97,13%
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%

Tujuan : Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	6	5	83%	17.600.000.000,-	16.571.390.915,-	94,16%
Sasaran : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	6	5	83%			
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%
Tujuan : Mewujudkan tertib administrasi Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	3	3	100%	346.378.100,-	312.408.224,-	90,19%
Sasaran : Penegasan batas wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai		29,2	29.2	100%			
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	

Tujuan : Meningkatnya efisiensi dan efektivitas organisasi pernagkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (RINGHTSIZIN G)	30	29	97%	449.551.620,-	401.074.328,-	89,22%
Sasaran : Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	30	29	97%			
Program : Program Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota				62.216.151.818,-	59.173.296.838,-	95,11%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel VI
Efisiensi penggunaan Sumber Daya
Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	550%	97,86%	5,62	Efisien	

	dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	333%	93,16%	3,57	Efisien	
		Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	0%	95,25%	0,00	Kurang Efisien	
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	100%	97,17%	1,03	Efisien	
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	133%	97,13%	1,37	Efisien	
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	83%	94,16%	0,88	Kurang Efisien	
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	100%	90,19%	1,11	Efisien	

6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	97%	89,22%	1,09	Efisien	
----	----------------------------------	--	-----	--------	------	---------	--

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* terlaksananya Kerjasama antar Daerah tingkat efisiensinya adalah 5 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (550%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97,86%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketigatingkat efisiensinya adalah 3 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (333%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (93.16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3* terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri tingkat efisiensinya adalah 0 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (95.25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4* terlaksananya tercapainya Pembinaan BUMD tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97.17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- e. Pada *Indikator Kinerja Utama 5* terlaksananya tercapainya jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97.13%). Pencapaian tersebut

menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- f. Pada *Indikator Kinerja Utama 6* jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan tingkat efisiensinya adalah 0 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (50%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (94.16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- g. Pada *Indikator Kinerja Utama 7* Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumaitingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (90.19%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- h. Pada *Indikator Kinerja Utama 8* terlaksananya tercapainya jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakantingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (97%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (89.22%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 66 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab kepada Wali kota.

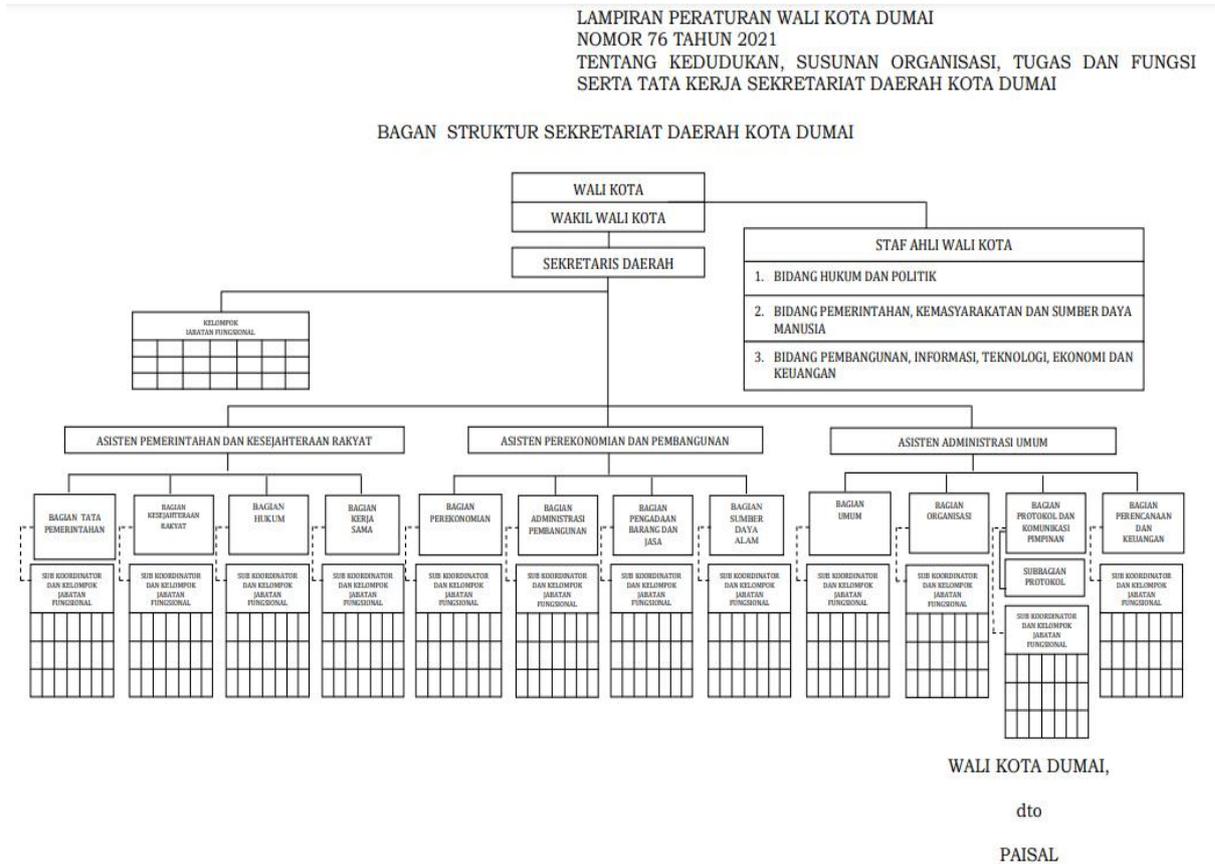
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan;

5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.
6. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bagian Kerja Sama, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari;
 - a). Subbagian Protokol;
 - b). Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bagian Kerja Sama, terdiri dari;
Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Staf Ahli Wali kota; dan

f. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Gambar 1.2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah yang perlu ditangani sbb:

1. Belum optimalnya manajemen pengelolaan data materi LPPD di setiap Perangkat Daerah (PD) sehingga berdampak pada pengukuran evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Belum tuntasnya penataan batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai;
3. Belum tuntasnya tindak lanjut penyelesaian pasca ditetapkan batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di kecamatan dan kelurahan.
5. Kelembagaan pemerintah masih belum optimal melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.
6. Perlu ditingkatkan nilai - nilai agama dan budi pekerti sejak dini;
7. Registrasi dan aplikasi pengelolaan kegiatan hibah dan bantuan sosial lebih dioptimalkan;
8. Perlu ditingkatkan pemahaman nilai - nilai keagamaan pada masyarakat;
9. Belum dimilikinya pejabat fungsional (kurangnya aparatur) dalam penyusunan peraturan perundang - undangan untuk keabsahan produk hukum daerah;
10. Belum optimalnya bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi permasalahan dalam hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlindungan hukum;
11. Perlunya ditingkatkan akses layanan, dokumentasi dan informasi hukum;

12. Kurangnya pemahaman Perangkat daerah dalam hal pemetaan (Mapping) Potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan dan menyesuaikan dengan Rencana Induk Kota.
13. Minimnya Kerjasama yang dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah.
14. Kurangnya sarana dan prasarana operasional wajib berupa Perangkat Computer, Laptop, Kamera, dan Printer;
15. Belum maksimalnya pagu anggaran pada Bagian Kerjasama;
16. Tertundanya Kerja Sama Luar Negeri dikarenakan kebijakan pemerintah pusat untuk pelarangan perjalanan Dinas Luar Negeri (Lockdown) dikarenakan wabah Covid-19.
17. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk Analisa Kebijakan Kerjasama.
18. Belum optimalnya kinerja BUMD dan BLUD Kota Dumai dalam menggarap/mengolah sumber-sumber potensi ekonomi yang ada/sumber pendapatan daerah;
19. Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah;
20. Belum optimalnya sumberdaya untuk mendorong penerapan *Good Corporate Governmant* (GCG) di lingkungan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui *e-government*.
21. Belum optimalnya pengembangan instrument pembiayaan non konvensional untuk UMKM;
22. Belum memadainya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam mengelola BUMD dan BLUD.
23. Perlu ditingkatkannya fungsi koordinasi, evaluasi dan sinergisitas antar perangkat daerah demi tercapainya kemajuan pembangunan daerah Kota Dumai.
24. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di perangkat daerah terkait penyampaian data RUU
25. Kurangnya jumlah personil di bagian Administrasi Pembangunan
26. Belum cukup tersedia data Sumber Daya Alam Kota Dumai
27. Belum adanya kebijakan yang terintegrasi dalam pengelolaan SDA

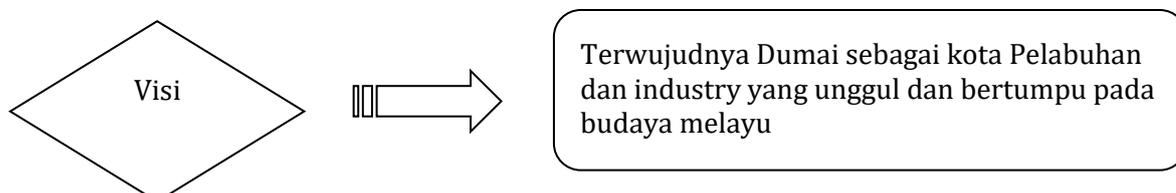
28. Sumber daya manusia yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas.
29. Kurangnya sarana dan prasana pendukung dalam menjalankan tugas.
30. Perlunya peningkatan pelayanan administrasi surat menyurat dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai.
31. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik daerah.
32. Belum disusun dan ditetapkan Standar Kopetensi Jabatan (SKJ);
33. Belum terpenuhinya Indikator pelayanan publik;
34. Perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
35. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan acara resmi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai;
36. Perlu ditingkatkannya fungsi koordinasi dan evaluasi pelaporan kegiatan berdasarkan hasil perencanaan serta terselenggaranya pengendalian kegiatan maupun kebijakan pemerintah daerah;
37. Kurangnya Sumber daya manusia dalam menunjang kinerja; dan
38. Perlunya peningkatan pengamanan dan pengelolaan aset - aset di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai. dst

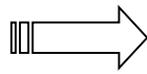
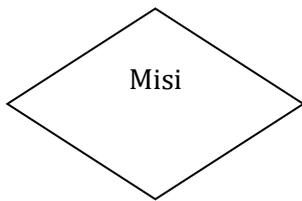
1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

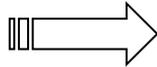
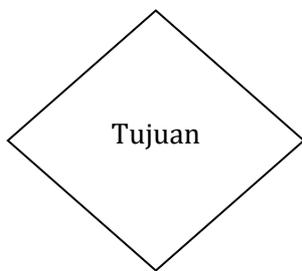
Gambar 1.5.1

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah

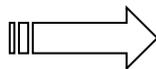
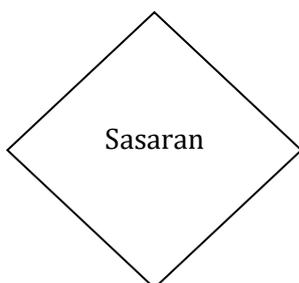




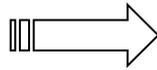
1. Mengembangkan Pembangunan Ekonomi kota yang berdaya saing dan bertumpu pada Pelabuhan dan industry;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik.



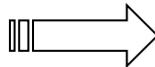
1. Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah;
2. Menjadikan BUMD yang Mandiri dan Profesional;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ;
4. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi Pendidikan;
5. Mewujudkan tertib Administrasi Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
6. Meningkatnya efisiensi efektivitas organisasi perangkat daerah melalui



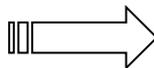
1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri;
2. Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD;
3. Meningkatnya Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi;
4. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan;
5. Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
6. Meningkatnya Penataan Organisasi.



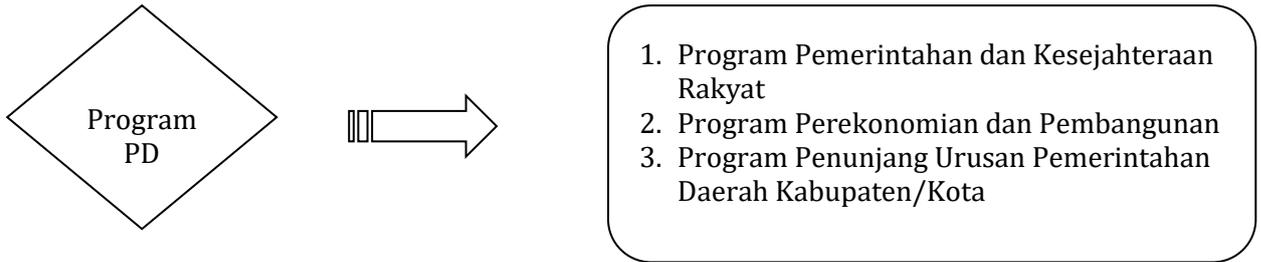
1. Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga;
2. Jumlah BUMD yang dibina dan dikembangkan;
3. Jumlah mahasiswa yang memperoleh bantuan beasiswa;
4. Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan;
5. Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
6. Jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (RINGHTSIZING)



1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri;
2. Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD;
3. Meningkatnya Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi;
4. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan;
5. Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
6. Meningkatnya Penataan Organisasi.



1. Terlaksananya Kerjasama antar Daerah, terlaksananya Kerjasama daerah dengan pihak ketiga, terlaksananya kerjasama daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri.
2. Tercapainya Pembinaan BUMD
3. Jumlah MAhasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi
4. Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan
5. Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai
6. Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang

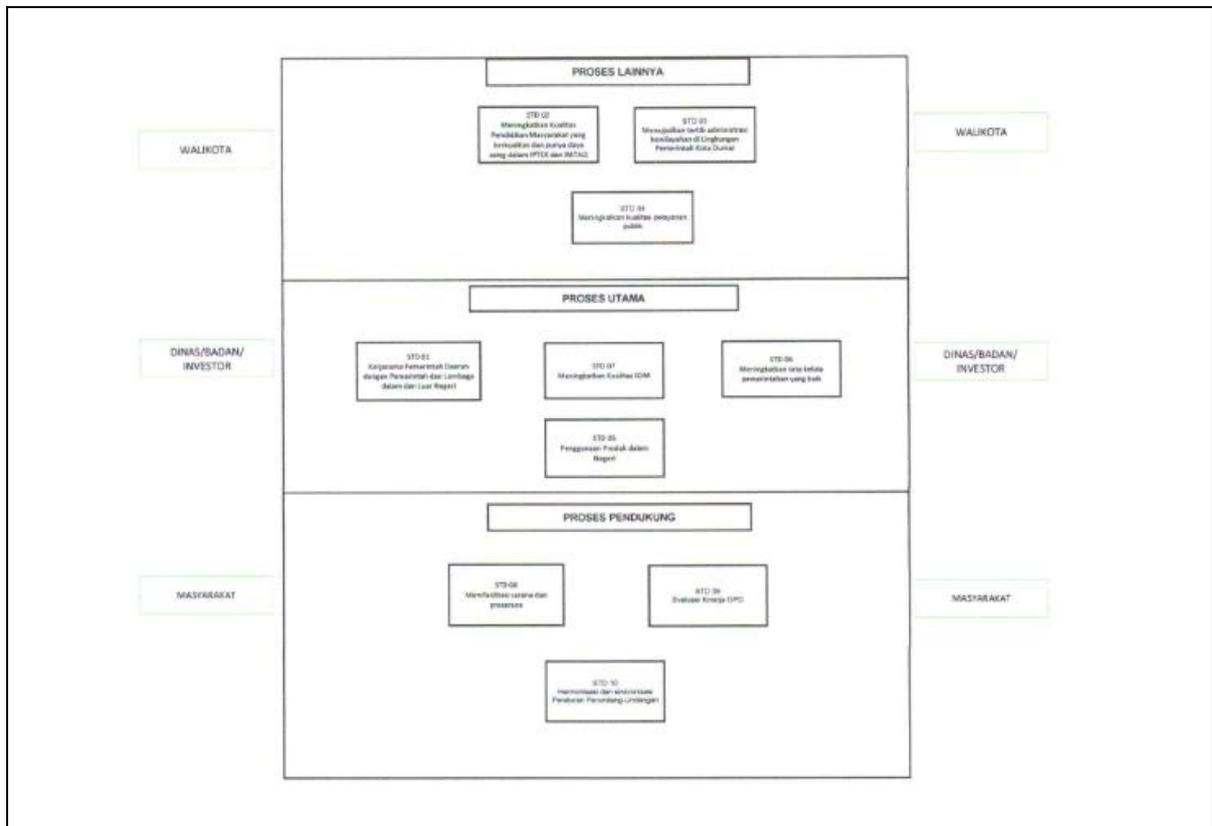


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Sekretariat Daerah sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.6.1

Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kota Dumai



(https://drive.google.com/file/d/19SdJJdsbFQMzhXLP1vBbFFXpaMuiCVY8/view?usp=drive_link)

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1325.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Sekretariat Daerah Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.7.1
Saran Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Belum semua pegawai menetapkan rencana aksi dan evaluasi telah dilakukan namun pegawai belum menyampaikan hasil evaluasi	Setiap pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Dumai perlu menetapkan rencana aksi yang mendukung capaian kinerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tersebut secara berkala
2.	Belum dilakukan pembaruan terhadap SOP	Sekretariat Daerah Kota Dumai perlu menyusun mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan data dan pengukuran kinerja dimasa mendatang
3.	Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta penetapan indikator kinerja kurang memperhatikan keterkaitannya dengan kebutuhan yang ingin dicapai (konsistensi dengan isu strategis yang telah ditetapkan	Dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja nya (Renstra) dimasa mendatang, Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta penetapan indikator kinerja agar memperhatikan keterkaitannya dengan kebutuhan yang ingin dicapai (konsistensi dengan isu strategis yang telah

		ditetapkan
4.	Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan perencanaan kinerja belum memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting	Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan perencanaan kinerja agar dapat memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting
5.	Bekum terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja di level nasional	Agar selanjutnya Sekretariat Daerah Kota Dumai memberikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja di level nasional/internasional (Benchmark) dan informasi terkait efisiensi penggunaan anggaran/sumber daya dalam rangka penyusunan dokumen laporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Dumai

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.7.2
Langkah-Langkah Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Menghimbau kepada setiap PNS dilingkungan untuk menyampaikan Rencana aksi dan evaluasi secara berkala	Januari 2024
2.	Standar Operasional Prosedur di Sekretariat telah buat dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023	-

3.	Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta penetapan indikator kinerja akan memperhatikan keterkaitannya dengan kebutuhan yang ingin dicapai (konsistensi dengan isu strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan pada Perubahan Renstra 2021-2026 yang sedang dalam proses	Januari 2024
4	Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan perencanaan kinerja akan memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting. Hal ini dilakukan pada Perubahan Renstra 2021-2026 yang sedang dalam proses	Januari 2024
5	Sekretariat Daerah Kota Dumai akan memberikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark) dan informasi terkait efisiensi penggunaan anggaran/sumber daya dalam rangka penyusunan dokumen laporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Dumai. Telah dilaksanakan pada laporan LKjIP tahun 2023	Januari 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Sekretariat Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

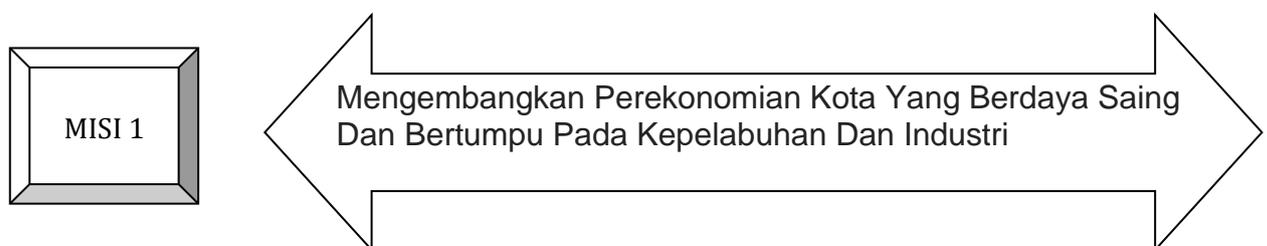
Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

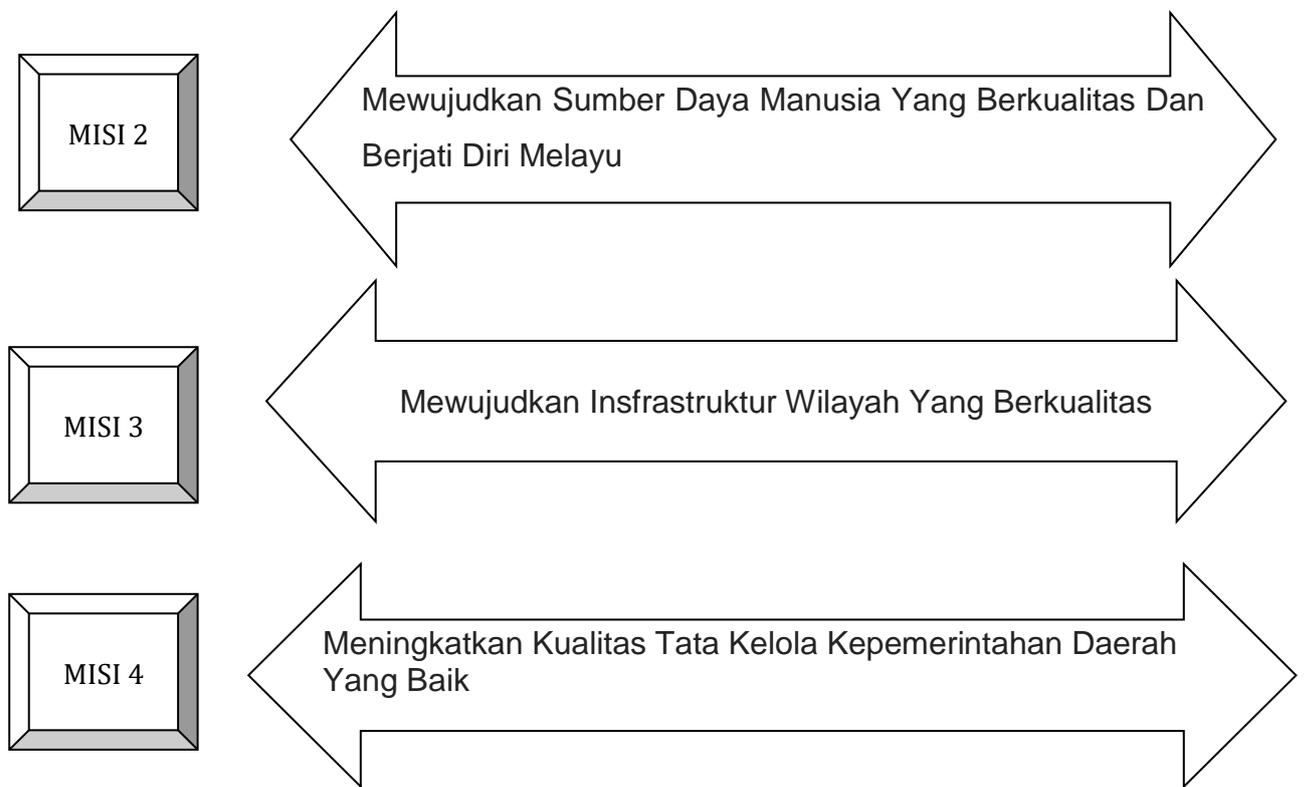
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

5. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri;
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu;
7. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas;
8. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:





2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Sekretariat Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari Tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Sekretariat Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Sekretariat Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi Ke 1 : Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak ketiga	9	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri	1. Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah	2
				2. Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	6
				3. Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan	1

				Lembaga di Luar Negeri	
2. Menjadikan BUMD yang mandiri dan Profesional	Jumlah BUMD yang dibina dan dikembangkan	3	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3

Misi Ke 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ	Jumlah mahasiswa yang memperoleh bantuan pendidikan	30	Meningkatnya Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa beprestasi	30
2. Meningkatkan Kerjasama Daerah dengan Institusi pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan;	6	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi /Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	6

Misi Ke 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.Mewujudkan tertib administrasi kewilayahan di lingkungan	Terlaksananya penegasan batas wilayah antar kecamatan dan	3	Penegasan Batas Wilayah Lingkungan Pemerintah Kota	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di	29.2

Pemerintah Kota Dumai	antar kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai		Dumai	Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	
Misi Ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang baik					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Perangkat Daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing)	30	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	30

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi Ke 1 : Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri	Pelaksanaan Rencana Kerjasama Dalam Negeri
2. Menjadikan BUMD yang Mandiri dan Profesional	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	1. Meningkatkan Pembinaan BUMD; 2. Meningkatkan Kualitas SDM BUMD; 3. Melakukan Ekspansi Usaha; 4. Meningkatkan Laba Usaha.	1. Restrukturisasi kepengurusan BUMD 2. Pembinaan Teknis SDM BUMD 3. Pembinaan GCG BUMD
Misi Ke 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Menyediakan Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi	Menyediakan Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi asal Kota Dumai

2. Meningkatkan Kerjasama Daerah dengan Institusi Pendidikan	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Pelaksanaan Rencana Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
Misi Ke 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tertib administrasi kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Menoptimalkan penyelesaian Batas Wilayah antar Kecamatan dan Kelurahan	Membuat target penyelesaian batas antar wilayah pada setiap tahunnya
Misi Ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Perangkat Daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 2. Peningkatan Kapabilitas, Integritas dan Netralitas Aparatur 3. Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisiensi 4. Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan 3. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur 4. Melaksanakan Evaluasi, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah 5. Penerapan hasil Anjab dan ABK dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 6. Peningkatan Kompetensi

			Aparatur Penyusunan LKjIP 7. Monitoring dilakukan secara teratur dan dilakukan evaluasi dan koordinasi, apabila kegiatan tidak sesuai spesifikasi dilapangan dengan pengelola kegiatan dan instansi terkait 8. Penerapan instrument-instrumen AKIP
--	--	--	--

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Sekretariat Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah 2.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 3.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Instutusi/Lembaga Pendidikan
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah kota Dumai
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Ststruktur Perangkat Daerah yang disederhanaan

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah 2.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 3. Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	2 6 1
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa beprestasi	30
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	6
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	29.2
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	30

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 65.075.562.281,- (*Enam puluh lima milyar tujuh puluh lima juta limaratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah,-*) untuk melaksanakan 3 (Tiga) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.4.2
Program Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 41.991.967.930,-	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 19.655.488.790,-	Dana Bagi Hasil PAD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 3.428.105.561,-	Dana Bagi Hasil PAD
J U M L A H		Rp 65.075.562.281,-	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.3
Program Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 62.216.151.818,-	Pendapatan Asli Daerah, DAU dan DBH
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 30.323.132.240,-	Dana Bagi Hasil PAD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 6.035.882.866,-	Dana Bagi Hasil PAD
J U M L A H		Rp 98.575.166.924,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Sekretariat Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus :

a. Rumus :
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus :

b. Rumus :
$$capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sekretariat Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Sekretariat Daerah Kota Dumai telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam Tabel X dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	6	300 %	2	11	550%	Sangat Berhasil
		Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak	7	140 %	6	20	333%	Sangat Berhasil
		Ketiga Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	0	0 %	1	0	0%	Tidak Berhasil
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	100 %	3	3	100 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	15	75 %	30	40	133%	Sangat Berhasil
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lemba ga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	2	40 %	6	5	83%	Berhasil
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah	Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan	25	100 %	29.2	29.2	100 %	Sangat Berhasil

	Kota Dumai	dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai						
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	24	80 %	30	29	97%	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator terlaksananya Kerjasama antar Daerah

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator terlaksananya Kerjasama antar Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 2 Naskah Kerjasama dengan realisasi sebesar 11 Naskah Kerjasama tercapai 550% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 6 Naskah Dinas atau tercapai sebesar 300%, maka capaian Tahun 2023 meningkat sebesar 250%.
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** terlaksananya Kerjasama antar Daerah melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Dukungan dan komitmen pimpinan (kepala Daerah) terhadap inovasi daerah yang menjadi potensi dan program prioritas
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** terlaksananya Kerjasama antar Daerah adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya dukungan anggaran untuk mengakomodir kegiatan, koordinasi dan konsolidasi terkait fasilitasi rencana Kerjasama;
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk Analis Kerjasama Dalam Negeri;
 - Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam memahami Kerjasama Dalam Negeri (Regulasi Tata Cara dan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri).
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator terlaksananya Kerjasama antar

Daerah.adalah sebagai berikut:

- Dukungan anggaran yang optimal;
- Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kerjasama Dalam Negeri yang Kompeten;
- Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah terkait Regulasi Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri melalui Bimbingan Teknis ataupun Sosialisasi.

2. Indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 6 Naskah Kerjasama dengan realisasi sebesar 20 Naskah Kerjasama tercapai 333% atau bernilai kinerja sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 7 Naskah Kerjasama atau tercapai sebesar 140%, maka capaian Tahun 2023 meningkat sebesar 193%.
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Dukungan dan Komitmen Pimpinan (Kepala Daerah) terhadap inovasi daerah yang menjadi poti dan program prioritas;
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya dukungan anggaran untuk mengakomodir kegiatan, koordinasi dan konsolidasi terkait fasilitasi rencana Kerjasama;
 - Kurangnya SDM yang kompeten untuk analis Kerjasama Dalam Negeri;
 - Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam memahami Kerjasama Dalam Negeri (Regulasi Tata Cara dan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri).
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.adalah sebagai berikut:

- Dukungan anggaran yang optimal;
 - Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kerjasama Dalam Negeri yang Kompeten;
 - Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah terkait Regulasi Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri melalui Bimbingan Teknis ataupun Sosialisasi.
3. Indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri menunjukkan capaian yang tetap dengan Tahun 2022. Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 1 (satu) Naskah Kerjasama tidak terealisasi, atau bernilai kinerja sangat rendah.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Sumber Daya manusia (SDM);
 - Daya dukung peralatan kantor.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 - Kurang dukungan anggaran dalam melakukan peninjauan ke Luar Negeri;
 - Kebijakan Pimpinan atau Kepala Daerah lebih memprioritaskan Kerjasama Dalam Negeri.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 - Perlunya penambahan anggaran untuk pencapaian kinerja;
 - Perlunya dukungan dari Kepala Daerah.
4. Indikator Tercapainya Pembinaan BUMD
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator tercapainya pembinaan BUMD

menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 3 BUMD, realisasi sebesar 3 BUMD, tercapai 100 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Sama dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 3 BUMD atau tercapai sebesar 100%,

- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** tercapainya pembinaan BUMD sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah Korporatifnya Direksi BUMD.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** tercapainya pembinaan BUMD adalah sebagai berikut:
 - Faktor eksternal Perusahaan;
 - Ada hutang periode kepengurusan lama sehingga Perusahaan dalam keadaan sakit;
 - PT. Pembangunan Dumai masih dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa menyumbangkan PAD.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator tercapainya pembinaan BUMD. adalah sebagai berikut:
 - Menyarankan kepada Direksi PT. Pembangunan Dumai agar bisa mencari investor untuk mendukung bisnis;
 - Pembinaan BUMD hanya sebatas pembinaan terkait peraturan dan tata Kelola BUMD tidak masuk dalam ranah kerja dan keuangan BUMD.
5. Indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 30 Mahasiswa yang berprestasi dengan realisasi sebesar 40 Mahasiswa dengan capaian kinerja 133% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 15 Mahasiswa atau tercapai sebesar 75%, maka capaian Tahun 2023 meningkat sebesar 58%.
 - b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indicator** Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya ketersediaan anggaran APBD.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi adalah sebagai berikut:
 - Keterbatasan anggaran.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi adalah sebagai berikut:
 - Perlunya penambahan anggaran.
6. Indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 6 Naskah Kerjasama dengan realisasi sebesar 5 Naskah Kerjasama, tercapai 83% atau bernilai kinerja Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 2 Naskah Kerjasama..atau tercapai sebesar 40%, maka capaian Tahun 2023 meningkat sebesar 43%
 - b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indicator** Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Ketersediaan anggaran
 - adanya minat dari siswa
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - Kebijakan pimpinan yang menentukan untuk melakukan kerjasama
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan Survey pada Institusi/Lembaga Pendidikan untuk melakukan kerjasama
 - Menyampaikan pada pimpinan hasil survey
7. Indikator Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 29.2 % Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan dengan realisasi sebesar 29.2 % Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan, tercapai 100 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Sama dengan realisasi Tahun 2022 yakni tercapai 100 %.
 - b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah adanya dukungan dari pimpinan
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:
 - Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan'
 - Masih banyak segmen batas, baik antar Kelurahan atau antar Kecamatan yang masih maya dengan medan lapangan yang berat untuk dijangkau;
 - Masih kurang memadai Sumber Daya Manusia (SDM)
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:
 - Perlunya penambahan anggaran untuk perapatan Pilar Batas yang masih maya;
 - Perlunya pelatihan atau Diklat Teknis.
8. Indikator Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 30 Perangkat Daerah yang disederhanakan dengan realisasi sebesar 29 Perangkat Daerah, tercapai

97% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 24 Perangkat Daerah sebesar 80%, maka capaian Tahun 2023 meningkat.

- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Komitmen pimpinan didalam manajemen kinerja bawahan;
 - Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara staf dan pimpinan;
 - Adanya koordinasi/kolaborasi yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
- a. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan adalah sebagai berikut:
- Belum mampu membuat perencanaan strategis yang inovatif;
 - Kurangnya Kompetensi ASN
- b. Tindak lanjut Capaian Indikator Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan kompetensi ASN dengan melalui Diklat (disetiap Perangkat Daerah);
 - Perlu adanya dukungan tambahan ASN yang berkualitas;
 - Perlunya adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait seperti instansi/Lembaga/Kementerian.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
		Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	2	2	6	11	300%	550%
		Terlaksananya						

1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	5	6	7	20	140%	333%
		Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	1	1	0	0	0%	0%
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	3	3	100%	100%
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	20	30	15	40	75%	133%
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	5	6	2	5	40%	83%
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	25	29,2	25	29.2	100%	100%
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	30	30	24	29	80%	97%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 a. Pada Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Sekretariat Daerah selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah terlaksananya Kerjasama antar Daerah dengan target naskah kerjasama.
- b. Pada Tahun 2022 target yang akan dicapai sebanyak 2 (dua) naskah

kerjasama dengan realisasi pada Tahun 2022 adalah 6 (enam) Naskah Kerjasama dengan dengan capaian 300%

- c. Pada Tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 2 (dua) Naskah Kerjasama dan realisasinya adalah 11 (sebelas) Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 550%.
2. a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dengan target Naskah Kerjasama. Formulasi perhitungan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu Jumlah Potensi Kerjasama dikalikan 80%;
 - b. Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan sebanyak 5 Naskah Kerjasama dengan realisasi pada Tahun 2022 adalah 7 (tujuh) Naskah Kerjasama dengan capaian 140%;
 - c. Pada Tahun 2023 target kinerja naik menjadi 6 (enam) Naskah Kerjasama dan realisasinya adalah 20 (dua puluh) Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 333%.
 3. a. Indikator Kinerja yang ketiga adalah terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri dengan target Naskah Kerjasama.
 - b. Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebanyak 1 (satu) naskah kerjasama tetapi tidak terealisasi.
 - c. Pada Tahun 2023 target kinerja tetap masih 1 (satu) Naskah Kerjasama tidak terealisasi sehingga capaian kinerja 0.00%, tidak tercapainya target dikarenakan “
 - Kurang dukungan anggaran dalam melakukan peninjauan ke Luar Negeri;
 - Kebijakan Pimpinan atau Kepala Daerah lebih memprioritaskan Kerjasama Dalam Negeri.
 4. a. Indikator Kinerja Utama yang keempat adalah tercapainya Pembinaan BUMD dengan target 3 (tiga) BUMD pada Tahun 2022. Formulasi perhitungan pembinaan BUMD yaitu Jumlah BUMD
 - b. Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan yaitu 3 (Tiga) BUMD yang dibina dengan realisasi 3 (tiga) BUMD dengan capaian 100%.

- c. Pada Tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 3 (tiga) BUMD. dan realisasinya adalah 3 (tiga) BUMD dengan capaian kinerja 100%
- 5.
- a. Indikator Kinerja Utama yang kelima adalah Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi. Formulasi Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi yaitu Jumlah Mahasiswa.
 - b. Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan sebanyak 20 Orang Mahasiswa dengan realisasi 15 Mahasiswa dengan capaian 75%.
 - c. Pada Tahun 2023 target kinerja naik menjadi 30 Mahasiswa dan realisasinya adalah 40 Mahasiswa dengan capaian kinerja 133%
- 6.
- a. Indikator Kinerja Utama yang keenam adalah Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan dengan target 5 Naskah Kerjasama pada Tahun 2022. Formulasi Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan yaitu Jumlah Target Mahasiswa dibagi dengan 10 Mahasiswa;
 - b. Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan sebanyak 5 Naskah kerjasama dengan realisasi pada Tahun 2022 adalah 2 Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 40%.
 - c. Pada Tahun 2023 target kinerja naik menjadi 6 Naskah Kerjasama dan realisasinya adalah 5 Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 83%
Tidak tercapainya 100% dikarenakan kebijakan pimpinan yang menentukan untuk melakukan kerjasama.
- 7.
- a. Indikator Kinerja Utama yang ketujuh adalah Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Formulasi Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yaitu Jumlah Target Penetapan Batas dibagi dengan Jumlah Segmen dikali 100%.
 - b. Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan 25 Persen dengan realisasi pada Tahun 2022 adalah 25 Persen dengan capaian kinerja 100%.
 - c. Pada Tahun 2023 target kinerja naik menjadi 29,2 Persen dan realisasinya adalah 29,2 Persen sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100%.

8. a. Indikator Kinerja Utama yang kedelapan adalah Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan dengan target 30 Perangkat Daerah pada Tahun 2022. Formulasi Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan yaitu jumlah Perangkat yang ada di Pemerintah Kota Dumai.
- b. Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan 30 Perangkat Daerah dengan realisasi sebanyak 24 Perangkat Daerah pada Tahun 2022 dengan capaian kinerja 80%.
- c. Pada Tahun 2023 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 30 Perangkat Daerah dan realisasinya adalah dengan realisasi dengan capaian kinerja 97%.
Tidak tercapainya 100% dikarenakan :
- Struktur BPBD tergolong dalam klasifikasi B yang merupakan terdiri dari Kalaksa BPBD, Sekretaris dan 3 Kepala Seksi. Karena Struktur tersebut sudah sederhana tidak mungkin dilakukan penyederhanaan lagi.
 - BPBD berhubungan langsung dengan Masyarakat sehingga tidak diusulkan untuk penyederhanaan birokrasi.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) Tahun 2023 dapat dikatakan **BERHASIL**.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam table 3.3.1 berikut ini :

Tabel 3.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah	14	11	78.57%
		2.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	36	20	55.55%
		3.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	5	0	0%
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pemninaan Badan Usaha Milik Daerah	3	3	100%
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	50	40	80%
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Instutusi/Lembaga Pendidikan	35	5	14.29%
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan	41.7	29.2	70.02%

		Pemerintah kota Dumai			
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	30	29	96.66%

Upaya Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Terlaksananya Kerjasama antar Daerah sebagai berikut :
 - Dukungan anggaran yang optimal;
 - Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kerjasama Dalam Negeri yang Kompeten;
 - Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah terkait Regulasi Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri melalui Bimbingan Teknis ataupun Sosialisasi.
2. Capaian Indikator Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagai berikut :
 - Dukungan anggaran yang optimal;
 - Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kerjasama Dalam Negeri yang Kompeten;
 - Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah terkait Regulasi Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri melalui Bimbingan Teknis ataupun Sosialisasi
3. Capaian Indikator Terlaksananya Kerjasama Daerah Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri sebagai berikut :
 - Sumber Daya manusia (SDM);
 - Daya dukung peralatan kantor.
4. Capaian Indikator Tercapainya pembinaan BUMD sebagai berikut :
 - Koorporatifnya Direksi BUMD.
5. Capaian Indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi sebagai berikut :
 - Adanya ketersediaan anggaran APBD.

- Adanya dukungan dari pimpinan-
6. Capaian Indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan sebagai berikut :
- Ketersediaan anggaran
 - adanya minat dari siswa
7. Capaian Indikator Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagai berikut :
- Dukungan dari Pimpinan.
8. Capaian Indikator Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan sebagai berikut :
- Komitmen pimpinan didalam manajemen kinerja bawahan;
 - Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara staf dan pimpinan;
 - Adanya koordinasi/kolaborasi yang melibatkan seluruh perangkat daerah.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana Tabel XII berikut :

Tabel 3.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah	11	-	Tidak ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai
		2.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	20	-	
		3.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	0	-	
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan	Tercapainya Pemninaan	3	-	

	Daerah/BUMD	Badan Usaha Milik Daerah			
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	40	-	
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Instutusi/Lembaga Pendidikan	5	-	
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah kota Dumai	29.2	-	
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	29	-	

Dari table diatas Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional bila dilihat dari Sasaran Strategis tidak ada realisasi tetapi ada Target Nasional yaitu pendidikan nasional dengan menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah dilaksanakan sebanyak 28 (Dua puluh delapan) orang pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebanyak 60 (enam puluh orang) dari jumlah Guru Agama yang ada di Kota Dumai yaitu sebanyak 141 (Seratus empat puluh satu) orang yang belum bersertifikasi profesi guru agama Islam tetapi telah lulus seleksi. Sisa sebanyak 53 (lima puluh tiga) akan dianggarkan pada tahun 2024.

3.5 . Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 98.575.166.924,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp.

89.543.642.468,- (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 9.031.524.456,- (*Sembilan Milyar Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

1. Belanja Operasi	: Rp.	89.543.642.468,-
2. Belanja Modal	: Rp.	9.031.524.456,-
Jumlah	Rp.	98.575.166.924,-

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 93.874.609.881 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 85.745.774.976,- (*Delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 8.128.834.905,- (*Delapan milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima Rupiah*).

1. Belanja Operasi	: Rp.	85.745.774.976,-
2. Belanja Modal	: Rp.	8.128.834.905,-
Jumlah	Rp.	93.874.609.881,-

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas Tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.1
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 303.407.700,-	Rp 290.670.898,-	95,80%	
2	Meningkatnya PAD dari Laba	Program Perekonomian				

	Perusahaan Daerah/BUMD	dan Pembangunan	Rp 256.855.000,-	Rp 249.576.279,-	97,17%	
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 11.250.000.000,-	Rp 10.927.310.804,-	97,13%	
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 17.600.000.000,-	Rp 16.571.390.915,-	94,16%	
5	Penegasan batas wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 346.378.100,-	Rp 312.408.224,-	90,19%	
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Program Penunjang urusan Pemerintahan	Rp 449.551.620,-	Rp 401.074.328,-	89,22%	

Total anggaran belanja adalah Rp. 98.575.166.924,- (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) dengan realisasi Rp. 93.874.609.881 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), atau dengan capaian sebesar 95,26% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Efisiensi Anggaran
2. Sisa dari realisasi biaya perjalanan dinas
3. Sisa dari realisasi belanja ATK
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa belanja modal pengadaan Trafo tidak direalisasikan karena kebutuhan jaringan transmisi listrikyang diperlukan masih bias dilayani oleh PLN

3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga	10	32	320%			
Sasaran : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	2	11	550%	303.407.700,-	290.670.898,-	95,80%
	Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	6	20	333%			
	Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	1	0	0%			
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100%	100%	30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%

Tujuan : Menjadikan BUMD yang Mandiri dan Profesional	Jumlah BUMD yang dibina dan dikembangkan	3	3	3			
Sasaran : Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	100%	256.855.000,-	249.576.279,-	97,17%
Program : Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan Pembangunan	100 %	100%	100%	6.035.882.866,-	5.799.539.937,-	96,08%
Tujuan : Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh bantuan beasiswa	30	40	30			
Sasaran : Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	30	40	133%	11.250.000.000,-	10.927.310.804,-	97,13%
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100%	100%	30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%

Tujuan : Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	6	5	83%			
Sasaran : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	6	5	83%	17.600.000.000,-	16.571.390.915,-	94.16%
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100 %	100%	100%	30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%
Tujuan : Mewujudkan tertib administrasi di Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	3	3	100%			
Sasaran : Penegasan batas wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	29,2	29.2	100%	346.378.100,-	312.408.224,-	90,19%
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100%	100%	30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	

Tujuan : Meningkatnya efisiensi dan efektivitas organisasi pernagkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (RINGHTSIZING)	30	29	97%	449.551.620,-	401.074.328,-	89,22%
Sasaran : Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	30	29	97%			
Program : Program Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota	100 %	100%	100%	62.216.151.818,-	59.173.296.838,-	95,11%

3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* terlaksananya Kerjasama antar Daerah tingkat efisiensinya adalah 5 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (550%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97,86%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga tingkat efisiensinya adalah 3 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (333%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (93.16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3* terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri tingkat efisiensinya adalah 0 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (95.25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4* terlaksananya tercapainya Pembinaan BUMD tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97.17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- e. Pada *Indikator Kinerja Utama 5* terlaksananya tercapainya jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97.13%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- f. Pada *Indikator Kinerja Utama 6* jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan tingkat efisiensinya adalah 0 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (83%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (94.16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- g. Pada *Indikator Kinerja Utama 7* Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (90.19%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- h. Pada *Indikator Kinerja Utama 8* terlaksananya tercapainya jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan tingkat efisiensinya adalah 1

berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (97%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (89.22%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat daerah Kota Dumai Tahun 2023 disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 dengan kesesuaian RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, Dokumen RKPD Tahun 2023, Capai IKU Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai yang terdiri dari 6 (enam) Kinerja Utama dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja sasaran dengan hasil sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Indikator 1, Terlaksananya Kerjasama antar Daerah dengan target 2 (dua) kerjasama, realisasinya adalah 11 (sebelas) Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 550%.
2. Indikator 2, Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dengan target 6 (enam) Naskah Kerjasama dan realisasinya 20 (dua puluh) Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 333%.
3. Indikator 3, terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri dengan target 1 (satu) Naskah Kerjasama, pada indicator ini tidak terealisasi.
4. Indikator 4, Tercapainya Pembinaan BUMD mencapai target 100% yaitu dengan 3 BUMD yang dilakukan pembinaan.
5. Indikator 5, Mahasiswa berprestasi yang memperoleh beasiswa dengan target 30 (tiga puluh) orang pencapaiannya melebihi dari target yaitu 40 (empat) puluh orang dengan capaian kinerja 133%
6. Indikator 6, Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan yang di target 6 (enam) Naskah Kerjasama terealisasi sebanyak 5 (lima) Naskah Kerjasama atau dengan capaian kinerja 83%
7. Indikator 7, capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan target 29.2 % terlaksana 100%
8. Indikator 8, Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan dengan target 30 Perangkat Daerah yang terealisasi sebanyak 29 Perangkat Daerah

atau dengan capaian kinerja 97%.

Tidak tercapainya 100% dikarena Struktur BPBD tergolong dalam klasifikasi B dan BPBD berhubungan langsung dengan Masyarakat sehingga tidak diusulkan untuk penyederhanaan birokrasi.

B. LANGKAH PERBAIKAN / SARAN

Diharapkan Pimpinan atau Kepala Daerah dapat lebih memprioritaskan Kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri dari segi Kebijakan dan Penanganan agar tercapainya target Indikator Kinerja Utama dari Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

- Visi** : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu
- Misi** :
 1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelembahan;
 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
 3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik.
- Sasaran** :
 1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri;
 2. Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD
 3. Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi;
 4. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan;
 5. Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
 6. Meningkatnya Penataan Organisasi.

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET		
URAIAN	INDEKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI		KEBIJAKAN	PROGRAM
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
			4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19				
Terlaksananya fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga	Jumlah Potensi Kerjasama	NA	8	10	12	14	16	18	20	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	Jumlah Potensi Kerjasama OPD x 30%	NA	2	2	3	3	4	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri	Pelaksanaan Rencana Kerjasama Dalam Negeri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12		
			NA									Terlaksana Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	Jumlah Potensi Kerjasama OPD x 80 %	NA	5	6	7	8	10						

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

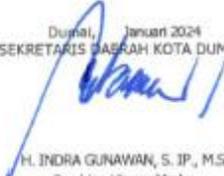
- Visi** : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu
- Misi** :
 1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhan;
 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
 3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.
- Sasaran** :
 1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri;
 2. Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD
 3. Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi;
 4. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan;
 5. Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
 6. Meningkatnya Penataan Organisasi.

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET		
URAIAN	INDEKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI		KEBIJAKAN	PROGRAM
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
			4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19				
Terlaksananya fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga	Jumlah Potensi Kerjasama	NA	8	10	12	14	16	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	Jumlah Potensi Kerjasama OPD x 30%	NA	2	2	3	3	4	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri	Pelaksanaan Rencana Kerjasama Dalam Negeri	Program Peningkatan dan Kesejahteraan Rakyat					
			NA												NA	5	6					7	8	10	

										Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri			NA	1	1	1	1	1			
Mengajukan BUMD yang Mandiri dan profesional	Jumlah BUMD yang (Bina dan dikembangkan	BUMD	NA	3	3	3	3	3	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	BUMD		NA	3	3	3	3	3	1. Meningkatkan pembinaan BUMD; 2. Meningkatkan Kualitas SDM BUMD; 3. Melakukan Ekspansi Usaha; 4. Meningkatkan Laba Usaha	1. Restrukturisasi kepengurusan BUMD 2. Pembinaan Teknis SDM BUMD 3. Pembinaan GCG BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan
Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan BHTAQ	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh bantuan pendidikan	Mahasiswa	NA	20	30	50	50	50	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Mahasiswa		NA	20	30	50	50	50	Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi	Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal Kota Dumai	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Kerjasama Daerah dengan Institusi Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lemba ga Pendidikan	Jumlah Target Mahasiswa / 10 Mahasiswa	NA	5	6	7	8	9	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lemba ga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lemba ga Pendidikan	Jumlah Target Mahasiswa / 10 Mahasiswa		NA	5	6	7	8	9	Meningkatkan Kerjasama Dengan Negeri dan luar Negeri	Pelaksanaan Rencana Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Mewujudkan tertib administrasi kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Terlaksananya penegasan batas wilayah antar kecamatan dan antar Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Target Penetapan Batas / Jumlah Segmen x 100% (3/72 x 100%)	NA	3	3	3	3	3	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Target Penetapan Batas / Jumlah Segmen x 100% (3/72 x 100%)		NA	25	29.2	33.3	37.5	41.7	Mengoptimalkan penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan	Membuat target penyelesaian batas antar wilayah pada setiap tahunnya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah melalui percepatan pelaksanaan	Jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (RUGHSZBING)	Jumlah Perangkat Daerah x 25% / 3	NA	30	30	30	30	30	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	Jumlah Perangkat Daerah x 25% / 3		NA	30	30	30	30	30	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; 2. Peningkatan kapabilitas,	1. Peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan; 3. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat	Program Penunjang urusan Pemerintahan

										Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri			NA	1	1	1	1	1				
Menjadikan BUMD yang Mandiri dan profesional	Jumlah BUMD yang dbina dan dikembangkan	BUMD	NA	3	3	3	3	3	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	BUMD	NA	3	3	3	3	3	1. Meningkatkan pembinaan BUMD; 2. Meningkatkan Kualitas SDM BUMD; 3. Melakukan Ekspansi Usaha; 4. Meningkatkan Laba Usaha	1. Restrukturisasi kepengurusan BUMD 2. Pembinaan Teknis SDM BUMD 3. Pembinaan GCG BUMD	Program Perencanaan dan Pengembangan		
Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan jasanya daya saing dalam IPTEK dan IHTAQ	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh bantuan pendidikan	Mahasiswa	NA	20	30	50	50	50	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Mahasiswa	NA	20	30	50	50	50	Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi	Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal Kota Dumai	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Meningkatnya Kerjasama Daerah dengan Institusi Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lemaba ga Pendidikan	Jumlah Target Mahasiswa / 10 Mahasiswa	NA	5	6	7	8	9	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lemaba ga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lemaba ga Pendidikan	Jumlah Target Mahasiswa / 10 Mahasiswa	NA	5	6	7	8	9	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri dan luar Negeri	Peleluasaan Rencana Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Menjadikan tertib administrasi kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Terlaksananya penegasan batas wilayah antar kecamatan dan antar Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Target Penetapan Batas / Jumlah Segmen x 100% (3/72 x 100%)	NA	3	3	3	3	3	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Target Penetapan Batas / Jumlah Segmen x 100% (3/72 x 100%)	NA	25	29.2	33.3	37.5	41.7	Hengoptimalkan penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan	Membuat target penyelesaian batas antar wilayah pada setiap tahunnya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (RIGHTSIZING)	Jumlah Perangkat Daerah x 25% / 3	NA	30	30	30	30	30	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	Jumlah Perangkat Daerah x 25% / 3	NA	30	30	30	30	30	30	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; 2. Peningkatan kapabilitas, integritas dan retabilitas aparatur; 3. Pembentukan struktur organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien; 4. Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan; 3. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur; 4. Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah; 5. Penerapan hasil anjab dan AIK dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 6. Peningkatan kompetensi aparatur penyusunan LKIP; 7. Monitoring dilakukan secara teratur dan dilakukan evaluasi dan koordinasi, apabila kegiatan tidak sesuai spesifikasi dilapangan dengan pengelola kegiatan dan instansi terkait; Penerapan instrument-instrumen AKIP.	Program Penunjang urusan Pemerintahan
--	--	-----------------------------------	----	----	----	----	----	----	----------------------------------	--	-----------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	---	--	---------------------------------------

Dumai, Januari 2024
 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

 H. INDRA GUNAWAN, S. IP., M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651007 198603 1 009

**RENCANA AKSI
TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	Naskah Kerjasama	2	-	✓	✓	-	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	meningkatkan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	30,323,132,240
		Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Naskah Kerjasama	6	✓	✓	✓	-	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
		Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	Naskah Kerjasama	1	-	-	✓	-	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah / BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	BUMD	3	-	-	✓	-	Program Perekonomian Dan Pembangunan	meningkatkan capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%	6,035,882,866
3	meningkatkan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Mahasiswa	30	-	-	✓	-	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	meningkatkan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	30,323,132,240
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerja Sama Daerah dengan Institusi / Lembaga Pendidikan	Naskah Kerjasama	6	-	-	✓	-	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan	%	30,323,132,240
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	%	29,2	-	-	-	✓	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengelolaan perbatasan di Kota Dumai	%	30,323,132,240
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	PD	30	-	-	-	✓	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	%	62,866,151,818
											Jumlah	99,225,166,924

SEKRETARIS DAERAH,

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19651007 198603 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si**
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19651007 198603 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	Naskah Kerjasama	2
		Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Naskah Kerjasama	6
		Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	Naskah Kerjasama	1
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah / BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	BUMD	3
3	meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Mahasiswa	30
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerja Sama Daerah dengan Institusi / Lembaga Pendidikan	Naskah Kerjasama	6
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	%	29.2
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanaan	PD	30

1 Sasaran 1

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Rp. 19.655.488.790

2 Sasaran 2

Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah / BUMD
Program Perekonomian Dan Pembangunan
Rp. 3.428.105.561

meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Rp. 19.655.488.790

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	19.655.488.790
---	---	-----	----------------

Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	19.655.488.790
---	---	-----	----------------

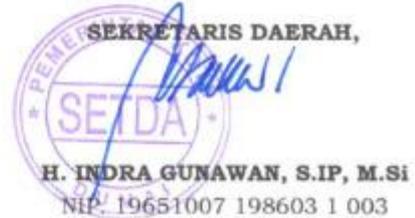
3 Sasaran 3

Meningkatnya Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	41.991.967.930
----------------------------------	---	-----	----------------

JUMLAH	Rp.	65.075.562.281
---------------	------------	-----------------------



Dumai, 3¹ Januari 2023





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


WALIKOTA DUMAI
PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

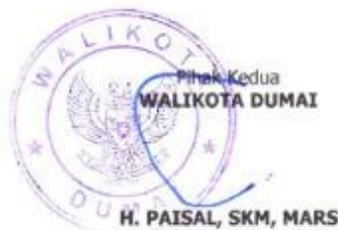
Dumai, 25 September 2023
PIHAK PERTAMA


H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP.19651007 198603 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri	- Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	Naskah Kerjasama	2
- Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga		Naskah Kerjasama	6	
- Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri		Naskah Kerjasama	1	
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah / BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	BUMD	3
3	meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Mahasiswa	30
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerja Sama Daerah dengan Institusi / Lembaga Pendidikan	Naskah Kerjasama	6
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	%	29.2
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanaan	PD	30

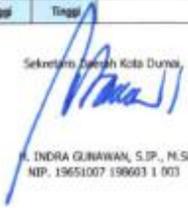
Sasaran 1 : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	30,323,132,240
: Meningkatkan PAD dari Laba Perusahaan Daerah / BUMD	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	6,035,882,866
Sasaran 2 : meningkatkan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	30,323,132,240
: Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	30,323,132,240
Sasaran 3 : Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	30,323,132,240
Sasaran 4 : Meningkatkan Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	62,866,151,818
Jumlah		Rp	99,225,166,924



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Daang/Bulan	184.124.000	0,4	13.028.800,00	0,40	32.026.202,00	0,30	35.438.000,00	0,40	15.430.000,00	2,00	30.415.000,00	100,00%	40,50%	90.415.000,00	-
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Houtok Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Real	44.253.000	-	0,00	-	0,00	0,00	44.271.000,00	-	0,00	2,00	44.174.000,00	100,00%	40,50%	44.174.000,00	-
	Penyediaan Mobil Ganda Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Orang	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-
	Penyediaan Dana Pelunasan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Daang/Bulan	600.000.000,00	0,18	150.000.000,00	0,10	150.000.000,00	0,30	150.000.000,00	0,10	150.000.000,00	2,00	600.000.000,00	100,00%	100,00%	600.000.000,00	-
	Fasilitas Kemanfaatan/Keagenan Sekretariat Daerah													1.477.800.000,00				
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4,00	Real	1.243.815.300,00	1,00	64.576.500,00	1,00	336.043.400,00	1,00	191.814.700,00	1,00	502.954.800,00	4,00	1.185.706.400,00	100,00%	93,70%	1.185.706.400,00	-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4,00	Real	111.000.000,00	-	-	1,00	111.000.000,00	-	-	-	0,00	1,00	111.000.000,00	100,00%	90,00%	111.000.000,00	-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4,00	Real	221.717.000,00	1,00	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00	1,00	26.702.000,00	1,00	44.000.400,00	4,00	201.427.600,00	100,00%	90,44%	201.427.600,00	-
	Penataan Organisasi													1.834.000.000,00				
	Penelitian Kebutuhan dan Analisis Jabatan	1,00	Dokumen	446.511.000,00	0,40	92.603.000,00	0,40	17.000.000,00	0,05	46.804.200,00	0,31	243.000.000,00	2,00	401.274.200,00	100,00%	60,22%	401.274.200,00	-
	Honorarium, Evaluasi dan Pengembangan Kualifikasi Pelayan Publik dan Teks Lainnya	1,00	Dokumen	474.460.110,00	0,30	11.300.000,00	0,10	44.122.000,00	0,40	93.204.000,00	-	277.127.007,00	1,00	434.626.207,00	100,00%	60,50%	434.626.207,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1,00	Dokumen	235.304.900,00	0,80	83.313.000,00	0,10	57.153.000,00	-0,13	2.130.000,00	-	130.177.912,00	1,00	200.902.412,00	100,00%	85,57%	200.902.412,00	-
	Perencanaan, Pelatihan dan Kemandirian Peningkatan													7.535.045.235,00				
	Facilitas Keperawatan	1,00	Laporan	3.741.958.220,00	0,11	404.670.000,00	0,24	908.074.000,00	0,17	940.812.000,00	0,30	1.947.615.240,00	1,00	3.732.706.220,00	100,00%	90,70%	3.732.706.220,00	-
	Facilitas Komunikasi Pemasaran	1,00	Laporan	1.282.419.770,00	0,20	941.600.000,00	0,12	716.032.000,00	-0,10	688.400.000,00	0,17	614.880.000,00	1,00	1.268.148.000,00	100,00%	49,10%	1.268.148.000,00	-
	Perbukitan/Manajemen Tugas Harian	1,00	Laporan	243.560.010,00	0,07	20.000.000,00	0,10	89.300.000,00	-0,12	113.940.000,00	-0,10	283.770.000,00	1,00	233.210.000,00	100,00%	90,40%	233.210.000,00	-
	PROGRAM PENGERTAHAN DAN KEMANDIRIAN BAKTI													684.120.540,00				
	Administrasi Tata Pemerintahan													684.120.540,00				
	Penyusunan Administrasi Pemerintahan	1,00	Dokumen	826.457.040,00	0,30	-	0,30	51.300.000,00	0,10	44.247.000,00	-	0,00	1,00	95.000.000,00	100,00%	90,72%	95.000.000,00	-
	Perencanaan Administrasi	1,00	Dokumen	346.378.130,00	0,10	8.210.000,00	0,05	21.907.000,00	0,10	306.838.000,00	0,30	175.707.000,00	1,00	312.408.130,00	100,00%	90,10%	312.408.130,00	-
	Facilitas Pelaksanaan Operasi (DASIS)	1,00	Dokumen	278.784.000,00	1,00	142.830.000,00	0,00	88.204.000,00	-	6.120.000,00	-	30.700.011,00	1,00	278.240.400,00	100,00%	90,81%	278.240.400,00	-
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat													27.408.701.710,00				
	Facilitas Pendidikan Bina Ranta (Kultur)	1,00	Dokumen	9.400.000.000,00	0,30	1.802.100.000,00	0,30	1.501.827.000,00	-0,20	632.870.000,00	0,20	3.793.400.000,00	1,00	6.102.000.410,00	100,00%	60,12%	6.102.000.410,00	-
	Perencanaan Kebijakan, Pelatihan, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1,00	Dokumen	8.900.000.000,00	0,30	1.800.000.000,00	0,30	1.113.761.000,00	0,10	858.700.000,00	0,10	470.901.000,00	1,00	6.401.340.000,00	100,00%	60,50%	6.401.340.000,00	-
	Perencanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1,00	Dokumen	11.200.000.000,00	0,40	1.500.000.000,00	0,10	2.474.300.000,00	0,20	1.802.000.000,00	0,30	1.611.947.000,00	1,00	10.817.100.000,00	100,00%	67,12%	10.817.100.000,00	-

	Penelitian dan Aktivasi Pemasaran Barang dan Jasa					4,00	Orang	80.343.500,00	4,30	80.323.000,00	0,00	13.500.000,00		3.696.990,00		496.621.277,00	4,00	361.191.289,00	100,00%	96,89%	86.193.289,00		-
	Pencapaian Subjekas Sember Daya Alam																	164.471.206,00					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Pertanian, Perikanan, Keanekaragaman Hayati, dan Pelestarian					1,00	Dokumen	79.044.200,00	6,30	17.218.000,00	6,20	17.750.000,00		24.200.000,00	0,00	19.914.500,00	1,00	76.362.040,00	100,00%	97,40%	76.002.040,00		-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					1,00	Dokumen	1.77.984.000,00	6,25	18.967.000,00	6,20	26.073.870,00		19.579.000,00	0,59	112.439.400,00	1,00	176.812.470,00	100,00%	99,24%	176.012.470,00		-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kegiatan Energi dan Air					1,00	Dokumen	103.115.900,00	6,10	3.490.000,00	6,20	3.800.000,00		39.625.840,00	0,60	51.120.000,00	1,00	102.395.060,00	100,00%	99,30%	102.395.060,00		-
								98.578.166.824,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										97,87%	92,42%			
																		Tinggi	Tinggi				
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					

Sekretaris Daerah Kota Dumai,


 H. INDRA GURAWAN, S.P., M.Si
 NIP. 19651007 196603 1 003